

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan terdapat catatan sejarah dari Tiongkok yang menunjukkan bahwa kontak awal telah terjadi pada masa Dinasti Han Timur (23–220 M). Hubungan tersebut berkembang hingga terjadi perdagangan langsung maupun tidak langsung antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Memasuki era modern, kedua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1950. Inisiatif ini dimulai oleh Mohammad Hatta, yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Ia menyatakan niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan pihak RRT menyambut niat tersebut dengan baik. Zhou Enlai yang pada masa itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RRT, segera mengutus Wang Renshu ke Jakarta sebagai Duta Besar pertama yang mewakili RRT di Indonesia. Indonesia kemudian juga mengirim Isak Mahdi sebagai *chargé d'affaires* atau kuasa usaha ke Beijing pada tahun 1951 (Liu, 2015).

Pada awalnya terdapat berbagai pihak di Indonesia yang merasa keberatan terhadap pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT, terutama dari kalangan muslim yang anti-komunis. Hal tersebut terjadi karena kekhawatiran terhadap

pengaruh ideologi komunisme, serta kecurigaan bahwa kehadiran diplomatik RRT akan meningkatkan simpati komunitas Tionghoa Indonesia terhadap nasionalisme Cina. Karena kondisi internal Indonesia ini, masa awal hubungan Indonesia dan RRT dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Meskipun demikian, hubungan Indonesia dan RRT akhirnya menunjukkan arah yang positif, terutama sejak masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang dimulai pada tahun 1953. Kabinet yang didominasi oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) ini berupaya memperkuat komitmen terhadap kebijakan luar negeri bebas-aktif, sehingga lebih leluasa untuk menjalin hubungan dengan negara-negara komunis (Liu, 2015).

Selanjutnya, hubungan Indonesia-RRT berkembang dengan cukup erat hingga awal 1960-an, hal tersebut didorong oleh semangat anti-imperialisme dan kerja sama dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 serta Poros “Jakarta-Beijing”. Dalam Konferensi Asia-Afrika, Zhou Enlai yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri RRT, mengungkapkan bahwa RRT datang untuk mencari persatuan dan ingin menciptakan lingkungan internasional yang damai, dengan mengenalkan *Five Principles of Peaceful Coexistence* atau Lima Prinsip Koeksistensi Damai (MLM Revolutionary Study Group in the U.S., 2007). Dengan adanya prinsip tersebut, RRT berharap dapat bisa menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan RRT menjadi semakin erat melalui konsep "Poros Jakarta-Beijing" yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Konsep ini mencerminkan keselarasan strategi politik kedua negara untuk melawan dominasi Blok Barat dan menjadi simbol

hubungan erat, yang diwarnai oleh kesamaan visi ideologis dan perjuangan melawan kolonialisme.

Kerja sama strategis lainnya ditunjukkan melalui dukungan-dukungan politik yang diberikan RRT terhadap Indonesia, termasuk pada Indonesia mengumumkan pengunduran dirinya dari PBB pada awal tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap pemilihan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, Indonesia juga mendukung posisi RRT dalam isu-isu internasional, termasuk dalam upaya RRT untuk memperoleh kursi perwakilan resmi di PBB yang saat itu masih dipegang oleh Republik Tiongkok (Taiwan). Hubungan yang erat ini mencerminkan keselarasan visi kedua negara dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan bebas dari dominasi negara-negara besar Barat. Hubungan erat antara kedua negara ini juga tercermin dalam sektor perdagangan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 1960, perdagangan antara Indonesia dan RRT kembali meningkat pada tahun 1963 dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 1965 (Armstrong, 1977 dalam Muas, 2015).

Hubungan antara Indonesia-RRT mulai berubah drastis setelah adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang dikaitkan dengan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dugaan dukungan dari RRT (Bandoro, 1994). Ketegangan politik domestik yang disertai dengan perubahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menyebabkan hubungan bilateral antara kedua negara memburuk. Pasca Peristiwa G30S 1965, Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengambil kebijakan “anti-komunis” yang sangat tegas. Pemerintah Orde Baru menganggap RRT sebagai pendukung utama PKI yang harus bertanggung jawab atas upaya kudeta

tersebut. Selain kecurigaan atas keterlibatan RRT dalam mendukung PKI, terdapat juga sentimen anti-Cina yang berkembang di masyarakat Indonesia yang menciptakan ketegangan dan memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat itu meyakini bahwa kaum Tionghoa merupakan sumber dari penyebaran komunisme di Indonesia yang berujung pada peristiwa G30S (Setiono, 2008 dalam Pratama, 2016).

Pemerintah Indonesia saat itu menuduh RRT tidak hanya terlibat dalam mendukung PKI, tetapi juga memanfaatkan komunitas Tionghoa di Indonesia untuk tujuan politik tertentu (Kroef, 1968). Puncak ketegangan antar kedua negara tersebut terjadi pada tahun 1967, dimana Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan RRT secara resmi. Langkah pemerintah Orde Baru dalam membekukan hubungan dengan RRT pada tahun 1967 mencerminkan pendekatan yang lebih condong ke arah Blok Barat, yang juga dipengaruhi oleh dinamika Perang Dingin. Pemerintah Indonesia pada saat itu segera menutup kedutaan besar RRT di Jakarta dan selanjutnya mulai 30 Oktober 1967, kepentingan RRT di Indonesia secara resmi diwakili oleh Kedutaan Besar Rumania, sementara kepentingan Indonesia di RRT ditangani oleh Kedutaan Besar Pakistan (Bandoro, 1994). Akibatnya, hubungan Indonesia-RRT memasuki fase stagnasi dalam waktu yang lama, dengan kedua negara memandang satu sama lain dengan penuh kecurigaan.

Seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai inisiatif dan sinyal politik yang mengarah pada pembukaan kembali komunikasi kedua belah pihak, yang menjadi landasan awal menuju proses pemulihan. Dalam konteks hubungan internasional, fase

pemulihan seperti ini seringkali dikaitkan dengan konsep normalisasi. Istilah ini mengacu pada proses pemulihan hubungan antarnegara menuju kondisi yang stabil dan fungsional. Menurut Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*, normalisasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan bersama guna mengatasi konflik melalui berbagai cara, seperti perjanjian damai, gencatan senjata, atau pembukaan kembali hubungan diplomatik (Barston, 2014). Dalam praktiknya, normalisasi sering dilakukan secara bertahap melalui diskusi formal maupun informal antarwakil kedua negara.

Upaya-upaya untuk memulai kembali hubungan Indonesia–RRT mulai terlihat pada era 1970-an. Adam Malik sebagai menteri luar negeri Indonesia dari tahun 1966 hingga 1977, memainkan peran kunci dalam merintis diplomasi dengan RRT. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat menggebu-gebu dalam usahanya untuk membuka hubungan dengan RRT, sehingga tindakannya kerap kali menimbulkan kontroversi. Sebagai contoh, pada Oktober 1970, Adam Malik mengirim Aboe Bakar Loebis untuk menjalin komunikasi dengan pihak RRT, tetapi upaya tersebut digagalkan oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong, karena tindakan itu dinilai tidak sejalan dengan kebijakan resmi pemerintah. Isu tersebut kemudian diambil alih oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), yang menganggap hal tersebut bukan bagian dari kebijakan resmi Indonesia, melainkan inisiatif dari Adam Malik sendiri (Sukma, 1999). Tindakan Adam Malik tersebut akhirnya menimbulkan kontroversi di masyarakat, mengingat pada masa awal Orde Baru, Indonesia masih sangat membatasi kontak dengan RRT. Dalam otobiografi Presiden Soeharto, ia memperlihatkan

ketidaksetujuannya dengan Adam Malik mengenai normalisasi hubungan dengan RRT. Presiden Soeharto juga mengungkapkan bahwa Adam Malik sering membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam isu-isu politik.

Menteri luar negeri setelah Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja terlihat lebih tenang dalam mengambil langkah untuk membuka hubungan dengan RRT. Mochtar Kusumaatmadja banyak melakukan kontak-kontak politik dengan RRT, karena perannya dalam penyelesaian Konflik Kamboja sebagai wakil Indonesia membuatnya sering berhubungan dengan perwakilan RRT. Pada masa ini, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) juga sedang melakukan pendekatan hubungan ekonomi kepada RRT. Kemajuan dari hubungan Indonesia-RRT di era Mochtar Kusumaatmadja terjadi saat Pada awal 1980-an, saat terjadi penurunan tajam harga minyak dunia yang mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor nonmigas, dengan fokus awal pada pasar Eropa Timur. Namun, kondisi harga minyak yang tidak menunjukkan perbaikan mendorong kalangan pengusaha untuk mempertimbangkan pasar RRT sebagai alternatif (Bandoro, 1994). Dari masalah tersebut, Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuka perdagangan langsung dengan RRT, meskipun hubungan diplomatik kedua negara masih mengalami kebekuan.

Pada akhir 1980-an, terjadi perubahan yang signifikan dalam hubungan Indonesia-RRT yang dimulai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang untuk menghadiri pemakaman Kaisar Hirohito pada 22 Februari 1989. Satu hari setelah acara pemakaman, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RRT Qian Qichen di Tokyo untuk membahas mengenai normalisasi hubungan

Indonesia-RRT. Ali Alatas, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, mendukung penuh keputusan Soeharto dalam hal tersebut. Walaupun keputusan dalam normalisasi Indonesia-RRT berada di tangan Soeharto, tetapi Ali Alatas juga berperan penting dalam melaksanakan upaya diplomatik dan mengelola hubungan yang rumit antar kedua negara. Dalam hal ini, Ali Alatas berusaha dengan baik untuk melakukan negosiasi dengan pihak RRT dan memastikan bahwa kepentingan Indonesia terwakili secara efektif dalam proses normalisasi ini.

Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada periode 1950–1990 menunjukkan dinamika yang kompleks dan mencerminkan keterkaitan erat antara kebijakan luar negeri dengan situasi politik domestik serta politik internasional. Perjalanan hubungan kedua negara yang diawali dengan semangat kerja sama, kemudian mengalami ketegangan hingga pembekuan total, dan akhirnya memasuki tahap normalisasi, menjadi contoh nyata bagaimana hubungan bilateral dapat dipengaruhi oleh ideologi, perubahan rezim, dan kepentingan strategis. Studi mengenai periode ini penting untuk memahami bagaimana Indonesia membentuk dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi tantangan geopolitik, serta bagaimana diplomasi dijalankan secara bertahap untuk mengembalikan hubungan yang sempat terputus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kronologis perkembangan hubungan Indonesia–Tiongkok selama kurun waktu 1950 hingga 1990, dengan menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan arah hubungan dan tokoh-tokoh kunci yang terlibat. Fokus kajian meliputi fase awal pembentukan hubungan, periode memburuknya relasi yang berujung pada pembekuan

diplomatik, serta tahapan negosiasi dan pendekatan ulang yang mengarah pada pemulihan dan normalisasi hubungan pada tahun 1990.

Dalam meneliti “Hubungan Indonesia dan Tiongkok 1950–1990: Dari Kedekatan, Ketegangan, hingga Normalisasi” ini, peneliti menemukan penelitian yang relevan. Penelitian tersebut berjudul “Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia dan Peran Konsep *Mianzi*” yang dilakukan oleh R. Tuty Nurmutia Enoch Muas, yang berisi tentang proses normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok yang lebih cenderung menjelaskan sudut pandang dan motivasi RRT dalam mewujudkan normalisasi hubungan, serta peran dari konsep *mianzi* pada budaya Cina terhadap proses normalisasi hubungan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai proses normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya menjelang tahun 1990. Sedangkan perbedaannya terdapat pada hasil penelitian, di mana penelitian terdahulu membahas mengenai proses normalisasi hubungan Indonesia–Tiongkok yang dikaitkan dengan konsep *mianzi*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok secara kronologis sejak tahun 1950 hingga 1990, dengan menyoroti perubahan politik, kebijakan luar negeri, dan peran berbagai tokoh dari kedua negara dalam membentuk dinamika hubungan bilateral tersebut.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dijabarkan diatas dan sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Hubungan Indonesia dan Tiongkok 1950–1990:

Dari Kedekatan, Ketegangan, hingga Normalisasi ” maka batasan yang menjadi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi jelas, di mana penelitian ini mencakup hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok dalam periode tahun 1950-1990. Tahun 1950 dipilih sebagai awal periode penelitian karena tahun ini merupakan awal mula Indonesia dan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Sedangkan tahun 1990 dipilih sebagai periode akhir penelitian karena pada tahun tersebut Indonesia dan Tiongkok secara resmi membuka kembali hubungan diplomatik yang sempat dibekukan pada tahun 1967.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan Indonesia dan Tiongkok pada tahun 1950 sampai 1990?”. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika awal hubungan Indonesia-Cina dan latar belakang bekunya hubungan diplomasi Indonesia-Cina?
2. Bagaimana proses normalisasi hubungan Indonesia-Cina dan peran tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang berjudul “Hubungan Indonesia dan Tiongkok 1950–1990: Dari Kedekatan, Ketegangan, hingga Normalisasi ” ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dari tahun 1950 hingga 1990, dengan menyoroti fase kedekatan awal, masa ketegangan politik, hingga tercapainya kesepakatan normalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh perubahan situasi di dalam dan luar negeri.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah politik dan hubungan internasional, khususnya dalam studi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia di era pasca-kemerdekaan hingga akhir Orde Baru.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau sumber dalam pembelajaran sejarah pada perkuliahan di

Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta dan dapat berguna bagi penelitian lain yang lebih mendalam mengenai kajian sejarah politik dan hubungan internasional.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami sebuah objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis yang hasil penelitiannya akan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Metode historis atau sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa rekaman dan peninggalan masa lalu secara kritis. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi sejarawan dalam proses merekonstruksi masa lalu secara imajinatif melalui fakta-fakta yang telah didapatkan (Gottschalk, 1975). Metode penelitian historis memiliki lima tahapan untuk menghasilkan penulisan yang komprehensif dan kronologis, yaitu: (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber; (3) verifikasi; (4) interpretasi; dan (5) penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a) Pemilihan Topik

Dalam menentukan topik penelitian sejarah, sebaiknya topik dipilih berdasarkan atas dua kedekatan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual (Kuntowijoyo, 2013). Dari topik penelitian yang penulis ambil,

yaitu “Hubungan Indonesia dan Tiongkok 1950–1990: Dari Kedekatan, Ketegangan, hingga Normalisasi”, penulis merasakan adanya kedekatan emosional dikarenakan ketertarikan penulis terhadap kajian politik luar negeri dan hubungan internasional, khususnya dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok. Sedangkan untuk kedekatan intelektual, topik yang akan diteliti ini selaras dengan latar belakang akademik penulis sebagai mahasiswa pendidikan sejarah yang pernah mempelajari sejarah politik dan hubungan internasional dan juga sejarah Asia Timur dalam perkuliahan. Penulis juga telah membaca berbagai macam sumber yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

b) Pengumpulan Sumber (*Heuristik*)

Tahapan kedua dalam penelitian historis adalah pengumpulan sumber atau *heuristik*. Sumber sejarah dapat disebut juga sebagai data sejarah yang harus dikumpulkan sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis, sumber sejarah sendiri terbagi menjadi tiga (Gottschalk, 1975), yaitu (1) sumber tertulis, yang dimuat dalam laporan tertulis; (2) sumber lisan, yaitu keterangan yang diujarkan oleh pelaku atau saksi peristiwa sejarah; (3) sumber benda, yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan budaya yang disebut sebagai benda purbakala atau benda kuno. Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak menggunakan sumber tertulis berupa tulisan atau dokumen, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Untuk sumber primer, penulis menggunakan artikel yang dimuat dalam surat kabar sezaman. Sedangkan

untuk sumber sekunder, penulis menggunakan buku, jurnal, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

c) Verifikasi

Tahapan ketiga dalam penelitian historis adalah verifikasi atau kritik sumber, di mana keabsahan dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan akan diuji melalui proses ini. Kritik sumber atau verifikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) autentisitas, keaslian sumber, atau kritik ekstern; dan (2) kredabilitas, kebiasaan dipercayai, atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013). Dalam melakukan kritik ekstern, penulis menganalisis autentisitas atau keaslian sumber dengan melihat tahun dan penerbit dari buku, koran, arsip, serta jurnal yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan dalam melakukan kritik intern, penulis fokus pada kredabilitas sumber dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam semua sumber yang telah diperoleh antara satu sama lain.

Contoh dari penerapan dari tahapan verifikasi ini adalah pada saat penulis mendapatkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti buku “Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1967” karya Taomo Zhou, penulis akan mengecek keabsahan sumber tersebut melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah kritik ekstern, di mana penulis menganalisis keaslian sumber melalui pemeriksaan nama pengarang, tahun terbit, serta penerbit buku tersebut. Setelah itu masuk dalam tahapan kedua, yaitu kritik intern, di mana penulis melakukan pemeriksaan terhadap kredabilitas informasi

yang terdapat dalam isi buku apakah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Setelah itu penulis juga membandingkan dan mencocokkan informasi yang didapat dengan sumber-sumber lainnya.

d) Interpretasi

Tahapan keempat dalam penelitian historis adalah interpretasi atau penafsiran sumber yang lazim disebut sebagai subjektifitas. Interpretasi sendiri terdiri dari dua macam, yaitu (1) analisis, yang berarti menguraikan atau memaparkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dari berbagai macam sumber; dan (2) sintesis, yaitu menggabungkan fakta-fakta sejarah sehingga dapat merekonstruksi sejarah yang baik dan benar dalam penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Sebagai contoh, penulis menafsirkan dan menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapat dari berbagai sumber, seperti dalam buku berjudul “Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru” karya Bantarto Bandoro. Penulis menganalisis fakta-fakta mengenai hubungan Indonesia dan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, selama masa Orde Baru, yang kemudian akan penulis gabungkan dengan fakta-fakta lain yang diperoleh dari sumber-sumber relevan lainnya.

e) Penulisan Sejarah

Tahapan kelima atau tahapan terakhir dalam penelitian historis adalah penulisan sejarah atau historiografi. Setelah melewati empat tahapan diatas, hasil penelitian mulai dapat dituliskan secara baik dan benar. Hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan terdiri atas (1) pengantar, (2) hasil

penelitian, dan (3) kesimpulan. Seorang sejarawan perlu untuk mempertimbangkan struktur dan gaya penulisan yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, karena penelitiannya bukan hanya penting bagi dirinya sendiri, melainkan juga memiliki dampak bagi orang lain yang membacanya. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting (Kuntowijoyo, 2013), maka dari itu dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menghasilkan sebuah tulisan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh, logis, dan sistematis dalam bentuk narasi yang kronologis. Hasil penelitian akan disajikan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif naratif.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Bahan sumber primer yang akan digunakan adalah artikel-artikel yang terbit pada rentan waktu penelitian yaitu tahun 1988-1998. Beberapa contohnya adalah artikel-artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Indonesia, yaitu Tempo dan juga artikel-artikel surat kabar Tiongkok, Renmin Ribao.

Sedangkan sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, serta hasil penelitian yang diantaranya adalah buku “Sukarno, Tiongkok, dan Pembentukan Indonesia” karya Hong Liu, “Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1967”

karya Taomo Zhou, “Diplomasi Tanpa Kehilangan Muka: Peran Konsep “Mianzi” di Balik Normalisasi Hubungan Diplomatik Tiongkok-Indonesia Tahun 1990” karya R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas, “Chinese Policy toward Indonesia: 1949-1967” karya David Mozingo, “Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru” karya Bantarto Bandoro, “Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto” karya Leo Suryadinata, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan perpustakaan lainnya.



Intelligentia - Dignitas